

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM GEMA MADANI SIMPATI DI KECAMATAN INDIHIANG KOTA TASIKMALAYA

Oleh :

Nanang Iskandar Zulkarnaen
email: nanangiskandar@gmail.com
Program Pascasarjana STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan mengenai Program Gema Madani Simpati di Kabupaten Indihiang Kota Tasikmalaya. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan Program Gema Simpati Madani, di mana dalam penelitian ini dilihat dari faktor kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi untuk implementasi program, karakteristik dan kemampuan lembaga pelaksana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan tujuan membuat gambaran yang kompleks, memeriksa kata-kata, laporan terperinci dari sudut pandang informan, dan melakukan studi dalam situasi alami. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan studi lapangan yang meliputi observasi, studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi kebijakan pada Program Gema Madani Simpati di Kabupaten Indihiang Kota Tasikmalaya dapat berjalan efektif dengan memperhatikan faktor lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi untuk implementasi program, karakteristik dan kemampuan lembaga pelaksana

Kata Kunci : implementasi kebijakan, Program Gema Madani Simpati.

ABSTRACT

This study aims to find out and analyze the implementation of policies regarding the Gema Madani Simpati Program in the Indihiang District of Tasikmalaya City. Many factors can influence the success in the implementation of the Madani Simpati Gema Program, where in this study seen from the factors of environmental conditions, relationships between organizations, organizational resources for program implementation, characteristics and capabilities of implementing agencies. This study uses qualitative methods, with the aim of making a complex picture, examining words, detailed reports from the informant's point of view, and conducting studies in natural situations. Data collection techniques are carried out through literature studies and field studies which include observation, documentation study and in-depth interviews. Data analysis techniques are done through data reduction, data display and conclusion drawing. Based on the results of research on the implementation of policies on the Gema Madani Simpati Program in the District of Indihiang Kota Tasikmalaya can run effectively by taking into account environmental factors, relationships between organizations, organizational resources for program implementation, characteristics and capabilities of implementing agencies.

Keywords: Implementation of policies and Gema Madani Simpati Program

PENDAHULUAN

Program Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing, dan Inovatif merupakan model pembangunan berbasis partisipasi di Kota Tasikmalaya, merupakan program pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dimana dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh lembaga kemasyarakatan dengan tujuan untuk memberdayakan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya.

Program Gema Madani–Simpati dikembangkan atas dasar prinsip kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna, Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW), DKM, PKK, dan lain-lain, yang tergabung dalam TPK dan PPL sebagai pelaksana teknis.

Program Gema Madani–Simpati diberikan keleluasaan serta ruang gerak kepada TPK sebagai pelaksana teknis untuk mengoordinasikan kegiatan-kegiatan pembangunan pada tingkat kelurahan dengan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya pembangunan yang dimiliki oleh masyarakat, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang dicapainya.

Salah satu dari 3 bidang bidang inovasi kegiatan, pembangunan kluster ekonomi masyarakat (I-PAKEM) telah berjalan dengan cukup baik yaitu dengan terbentuknya saung madani di 10 kecamatan sebagai pengendali dan pembina usaha kluster di setiap kelurahan, terbentuk 78 kelompok usaha kluster di 69 kelurahan, dengan 10 produk unggulan, memiliki jumlah anggota 566 orang yang tergabung dalam anggota kelompok usaha kluster, telah terlaksana pelantikan administrasi keuangan kelompok dan penajaman teknis usaha kluster di 69 kelurahan, terlaksana sosialisasi legalitas usaha dan training strategi pemasaran (pacing dan IT) di 69 kelurahan.

Capaian hasil kinerja bidang inovasi penataan infrastruktur lingkungan (I-PASLING) yang telah dilaksanakan yaitu dengan adanya pembangunan rabat beton jalan/gang lingkungan dengan volume 4.856 M3, labur aspal jalan/gang lingkungan dengan volume 2.432 M2, hotmix manual jalan/gang lingkungan dengan volume 2.051 M2, paving block jalan/gang lingkungan dengan volume 187 M2, drainase lingkungan dengan volume 420 m3. (<https://portal.tasikmalayakota.go.id>).

Pelaksanaan kebijakan dari program Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing, dan Inovatif merupakan model pembangunan berbasis partisipasi di Kota Tasikmalaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2019 belum seluruhnya berjalan secara efektif, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa fenomena sebagai berikut :

1. Kondisi lingkungan masyarakat di Kecamatan Indihiang kurang memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Program Gema Madani Simpati, sebagai contoh masih banyak masyarakat di Kecamatan Indihiang yang belum mengetahui tentang Program Gema Madani Simpati sehingga tidak banyak terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.
2. Kerjasama diantara para pelaksana program kebijakan yang masih kurang, sebagai contoh dalam menyampaikan atau mensosialisasikan adanya Program Gema Madani Simpati kepada masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan sehingga masyarakat dapat mengetahui secara langsung tentang Program Gema Madani Simpati, serta kurangnya keterlibatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada.
3. Sumber daya manusia sebagai pelaksana Program Gema Madani Simpati masih kurang, sebagai contoh masih pengelola masih belum mampu membuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran melalui pelaksanaan Program Gema Madani Simpati.

LANDASAN TEORI

Pemberdayaan masyarakat sesungguhnya upaya merubah pola perilaku masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian lewat empat aspek yaitu, perlindungan sosial, peningkatan kapasitas, peningkatan aksesibilitas dan pemanfaatan potensi lokal. Pasalnya, kebijakan pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan selama ini tidak terbatas tataran konsep adopsi program dan kegiatan semata, tapi terpenting mengadaptasi konsep tersebut kepada masyarakat. Istilah kebijakan sendiri menurut Rusli (2015, hal. 31) mengemukakan bahwa secara etimologis kebijakan yang berakar dari kata bijak itu memiliki makna yang cenderung positif, sehingga tidak ada kebijakan yang dimaksudkan untuk membawa sesuatu yang negatif, meskipun dalam praktiknya bisa saja demikian. Secara umum istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Dengan demikian, makna kebijakan bukan hanya domain organisasi publik, tetapi juga organisasi privat, baik formal atau non formal, bahkan individual.

Menurut Thoha (Kusnandar, 2012, hal. 4) mengemukakan “Kebijakan dalam arti luas mempunyai dua aspek pokok, sebagai berikut: (1) Merupakan praktek sosial, bukan even tunggal atau terisolir; (2) Suatu peristiwa yang ditimbulkan untuk mendamaikan “*claim*” pihak-pihak yang konflik atau untuk menciptakan “*incentive*” bagi yang diperlakukan tidak rasional dalam usaha bersama”. Kebijakan sering berkaitan dengan masalah-masalah publik, sehingga Anderson (Rusli, 2015, hal. 38) memberikan pengertian tentang kebijakan publik dengan menyatakan: *A relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with set a problem or matter of concern*” (Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, hal tersebut sebagaimana dikemukakan Lester dan Stewart (Winarno, 2002, hal. 101-102) dengan menyatakan bahwa: Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Setiap kebijakan harus dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan diterbitkannya kebijakan tersebut, dan perlu dilaksanakan melalui tahapan-tahapan dalam mencapai keberhasilannya, sebagaimana dikemukakan Rusli (2015, hal. 85) dengan menyatakan: Implementasi kebijakan (*policy implementation*) merupakan tahap pelaksanaan dari desain kebijakan yang telah dirumuskan (*policy formulation*). Dalam proses pelaksanaan itu diperlukan berbagai aktivitas termasuk penyiapan, pelaksanaan, sosialisasi, peningkatan kapasitas (*capacity building*), dari pihak pelaksana terutama (aparatur pemerintah). Berbagai tahapan sebelum pelaksanaan merupakan hal penting sebelum, bahkan selama implementasi. Jadi implementasi kebijakan adalah sebuah proses yang rumit dan kompleks dengan melibatkan berbagai aktivitas dan kegiatan serta berbagai macam pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis, menurut Cheema dan Rondinelli (Subarsono, 2005, hal. 101) meliputi:

1. Kondisi lingkungan.

Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, lingkungan tersebut mencakup lingkungan sosio cultural serta keterlibatan penerima program.

2. Hubungan antar organisasi.

Implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

3. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program.

Implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya, baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non human resources*).

4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

Maksudnya adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi dimana semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program

Berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh adanya 4 (empat) syarat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Menurut Edwars III (Kusnandar, 2012, hal. 104-109) empat syarat tersebut meliputi:

1. Komunikasi, yakni kejelasan yang harus disampaikan oleh pelaksana kebijakan
2. Sumber daya, yakni sarana dan prasarana yang tersedia untuk dapat mendukung dan memperlancar pelaksanaan kebijakan;
3. Disposisi atau sikap pelaksana, yakni adanya keinginan atau kesepakatan di kalangan para pelaksana dalam menjalankan kebijakan
4. Struktur birokrasi, yakni tata kerja dalam organisasi untuk mempermudah/memperlancar kebijakan.

Dari ke empat syarat tersebut di atas yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi, memiliki hubungan satu sama lainnya dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan tujuan membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan informan, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi observasi, studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya, Kecamatan Indihiang merupakan salah satu kecamatan di+ wilayah Kota Tasikmalaya dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya, maka Wilayah Administratif Kecamatan Indihiang meliputi 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Sukamaju Kaler, Kelurahan Sukamaju Kidul, Kelurahan Indihiang, Kelurahan Sirnagalih, Kelurahan Parakan Nyasag dan Kelurahan Panyingikiran dengan luas wilayah keseluruhan 11,488 km².

Data-data yang berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat melalui program Gema Madani Simpati suatu daerah, dilihat dari kondisi tenaga kerja, dimana di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya dapat digambarkan berdasarkan mata pencaharian pokok penduduk yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1. Mata Pencaharian Pokok Penduduk

NO.	Jenis Mata Pencaharian	Kelurahan						Jumlah
		Sukamajukaler	Sukamajukidul	Indihiang	Sirnagalih	Parakannyasag	Panyingikiran	
1.	Buruh	1.177	1.110	1003	917	1.443	1.127	6.668
2.	Pegawai Negeri Sipil	251	123	1.008	198	346	171	2.097
3.	TNI	5	1	10	18	11	6	51
4.	POLRI	13	7	14	10	17	18	79
5.	Pegawai Swasta	1.219	377	1.083	466	1.472	456	5.073
6.	Wiraswasta	742	595	995	740	1.881	591	5.544
7.	Pejabat Negara	-	-	-	-	-	3	3
8.	Tenaga Profesi	1.192	34	4	42	309	163	1.744
9.	Pensiunan	187	58	266	105	444	45	1.105
10.	Ibu Rumah Tangga	1.387	1.844	1.179	839	2.033	1.226	8.508
11.	Belum Kerja	4.267	655	1.108	1.431	966	1.258	9.685
12.	Tidak Bekerja	1090	471	679	834	716	496	4.286
13.	Lainnya	-	2.004	469	694	-	2.208	5.375
Jumlah		11.530	7.170	7.818	6.294	9.638	7.768	50.218

Tabel 2. Jumlah Keluarga Berdasarkan Tahapan Kesejahteraan Menurut Kelurahan di Kecamatan Indihiang

Kelurahan	Keluarga		
	Pra KS	KS1	KS
Panyingkiran	109	780	1374
Parakannyasag	22	127	2577
Sirnagalih	132	772	1164
Indihiang	61	854	2260
Sukamajukidul	93	855	1433
Sukamajukaler	200	1147	1799
Jumlah	617	4.535	9.692

Perekonomian di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 didorong oleh 5 sektor utama penggerak pertumbuhan ekonomi. Kelima sektor tersebut adalah (1) Sektor Industri Pengolahan (dengan kontribusi rata-rata sebesar 6,17%), (2) Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih (dengan kontribusi rata-rata sebesar 6,51%), (3) Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (dengan kontribusi rata-rata sebesar 8,29%), (4) Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (dengan kontribusi rata-rata sebesar 2,34%), dan (5) Sektor Jasa-jasa (dengan kontribusi rata-rata 2,15%). Kelima sektor tersebut menyerap tenaga kerja hampir 82% dari total tenaga kerja yang ada di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya.

Pertumbuhan ekonomi Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya sejak tahun 2012 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi tahun 2012 (berdasarkan PDRB harga konstan tahun 2012-2016) tercatat sebesar 5,18%, sedangkan di tahun 2016 pertumbuhan ekonomi mencapai angka 5,11%. Pertumbuhan ekonomi ini didukung dengan adanya peningkatan investasi baik dari sisi pemerintah (berupa kenaikan belanja modal pemerintah daerah) maupun dari sisi swasta (berupa peningkatan kredit dan investasi dalam bentuk PMA dan PMDN).

Pertumbuhan ekonomi Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya mengalami penurunan (0,07%) pada tahun 2016 menjadi hanya sebesar 5,07%. Kondisi ini disebabkan karena melemahnya pertumbuhan pada dua sektor utama penggerak PDRB Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, yaitu Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (Data PDRB Kota Tasikmalaya Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016) BPS Kota Tasikmalaya Tahun 2017.

Infrastruktur merupakan prasarana dasar perkotaan sebagai penunjang yang sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan, dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam rangka mengembangkan perekonomian Kecamatan Indihiang sebagai bagian dari wilayah Kota Tasikmalaya. Penyediaan infrastruktur pendukung harus berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya agar tercapai sinergitas pembangunan dari semua sektor.

Implementasi kebijakan tentang Program Gema Madani Simpati di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya selalu dilaksanakan di 6 (enam) kelurahan pada setiap tahun anggaran. Dalam pelaksanaannya banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, diantaranya dari faktor kondisi lingkungan dengan parameter yang diukur melalui sikap dan respon masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program Gema Madani Simpati, dan sikap masyarakat penerima program Gema Madani Simpati di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya.

Hasil penelitian dari ketiga parameter tersebut di atas menunjukkan sikap dan respon masyarakat masih kurang terkait masih kurangnya sosialisasi dari para pelaksana kebijakan Gema Madani Simpati di tingkat Kelurahan, sehingga partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut menjadi kurang. Diperlukan sosialisasi yang berkelanjutan dari para pelaksana kebijakan kepada seluruh masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat dapat meningkat. Hasil pelaksanaan program kegiatan dari adanya program Gema Madani Simpati tentu dapat dirasakan oleh masyarakat

setempat, dengan adanya beberapa program unggulan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Faktor kedua yaitu tentang kemampuan komunikasi dari para pelaksana kebijakan terhadap lembaga/organisasi terkait lainnya dalam pelaksanaan program Gema Madani Simpati di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, dimana dari hasil penelitian yang dilihat dari kemampuan komunikasi yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, kemampuan komunikasi antar lembaga pelaksana program Gema Madani Simpati, dan kemampuan komunikasi antar lembaga kemasyarakatan dalam pelaksana program Gema Madani Simpati, berdasarkan hasil penelitian para pelaksana telah cukup memiliki kemampuan dalam melakukan komunikasi, sehingga program-program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, namun demikian diperlukan pengembangan sumber daya manusia sehingga pelaksanaan program dapat lebih optimal. Faktor ketiga dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan tentang program Gema Madani Simpati di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya dilihat dari ketersediaan sumberdaya, yang meliputi ketersediaan sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan, adanya dukungan dan ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan, dan kemampuan pelaksana program Gema Madani Simpati.

Berdasarkan hasil penelitian dari ketiga parameter di atas, sumber daya manusia dalam pelaksanaan program Gema Madani di setiap Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya cukup tersedia, tetapi masih kurangnya dukungan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana bagi para pelaksana kebijakan, disamping dalam perekrutan mulai TPK, PPL dan pelaksana lapangan diperlukan adanya seleksi yang baik sehingga mendapatkan orang-orang yang memiliki kompetensi di setiap bidang atau unit kerja yang ada. Faktor terakhir yang menjadi ukuran keberhasilan dalam penelitian ini yaitu karakteristik dan kemampuan agen pelaksana, dalam hal ini Tim Pelaksana Kegiatan, Panitia Pelaksana Lapangan (PPL) Gema Madani Simpati dilihat dari ketersediaan struktur organisasi, sikap yang dimiliki oleh para pelaksana program Gema Madani Simpati dan hubungan yang terjalin diantara para pelaksana program Gema Madani Simpati di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya.

Hasil penelitian menunjukkan struktur organisasi mulai dari tingkat Kota sampai dengan pelaksana di lapangan telah diatur melalui Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing, dan Inovatif Sebagai Model Pembangunan Berbasis Partisipasi di Kota Tasikmalaya. Sementara setiap pelaksana sudah mengetahui dan memahami tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam program Gema Madani Simpati, namun demikian para pelaksana masih kurang melakukan komunikasi melalui sosialisasi kepada seluruh masyarakat di wilayah kerjanya agar partisipasi masyarakat dapat meningkat dalam melaksanakan beberapa program yang ada pada Program Gema Madani Simpati.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu implementasi kebijakan tentang Program Gema Madani Simpati di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya dapat berjalan efektif dengan memperhatikan faktor kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi untuk implementasi program, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Dari beberapa faktor yang masih perlu mendapatkan perhatian dari pemangku kebijakan yaitu dalam menentukan sumberdaya manusia sebagai pelaksana kebijakan perlu orang-orang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam berbagai program yang direncanakan melalui program Gema Madani Simpati agar dapat berjalan secara efisien dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusnandar, Ishak. (2012). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Multazam.
- Rusli, Budiman. (2015). *Kebijakan Publik, Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*, Cetakan ke II, Bandung: Adoya Mitra Sejahtera.

Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Winarno, Budi. (2002). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Edisi Revisi, Yogyakarta: Media Presindo